

Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Alat Bantu Difabel pada Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Evaluation of the Implementation of the Assistive Devices Provision Program for Person with Disabilities by the Social and Community Empowerment Office of Samarinda City

Nurul Aqsha Fajriyani^{1*}, Agustin Nurmanina²

¹²Prodi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

*aqshanurul93@gmail.com

Article history

Submitted: 2025/05/2; Revised: 2025/06/2; Accepted: 2025/06/12

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jenis-jenis alat bantu yang telah diberikan dalam program pemberian alat bantu difabel hingga mengevaluasi pelaksanaan program pada penyandang disabilitas oleh Dinsospenmas Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada empat komponen dalam model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) oleh Daniel Stufflebeam dan dinilai menggunakan analisis ketercapaian evaluasi program, yaitu pengklasifikasian tiga kategori penilaian (Tinggi, Moderat, Rendah) dari Issac dan Michael. Data diperoleh dari data primer dan sekunder melalui teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan evaluasi menunjukkan bahwa pada aspek konteks, sebagian besar komponen evaluasi telah terpenuhi dengan beberapa catatan bahwa masih kurang optimalnya pendataan dalam mengkategorikan jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenisnya. Pada aspek masukan, komponen evaluasi terpenuhi sebagian. Tidak adanya bentuk kerja sama dengan pihak luar sementara hal tersebut merupakan suatu aspek yang cukup besar menunjang kesuksesan suatu program. Begitu pula pada aspek proses dan hasil, komponen evaluasi keduanya terpenuhi sebagian. Proses monitoring yang hanya dilakukan satu kali, alat bantu yang tersedia dan yang diberikan berukuran sama rata, hingga muncullah berbagai ketidaksesuaian mulai dari segi ukuran, kenyamanan, maupun tingkat keparahan disabilitas penerima alat bantu difabel.

Keywords

Alat Bantu Difabel; Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; Evaluasi; Penyandang Disabilitas;



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas termasuk pada kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebab keterbatasan yang mereka hadapi mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sosial dan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Indraningrum, 2021). Berbagai faktor penyebab ini diantaranya ialah stigma yang melekat pada penyandang disabilitas, dimana mereka seringkali dianggap sebagai individu yang tidak sempurna.

Menurut data berjalan yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terdapat sekitar 22,5 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia, yang setara dengan sekitar 5% dari total populasi penduduk Indonesia. Sementara di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, jumlah penyandang disabilitas di tahun 2024 sebanyak 1587 jiwa. Namun, jumlah ini masih tergolong tinggi, mengingat jumlah penyandang Disabilitas di Kota Samarinda menempati urutan kedua sesudah Kabupaten Kutai Kartanegara (3563 jiwa).

Orang dengan disabilitas, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat 1 tentang Penyandang Disabilitas ialah individu yang alami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang berlangsung lama, maka seringkali menghadapi hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan guna berpartisipasi secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya. Undang-Undang ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kondisi rentan, terbelakang, dan kemiskinan yang dialami oleh penyandang disabilitas di Indonesia.

Sebagai bentuk perhatian dan pedoman dalam berbagai kebijakan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Adapun Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda sendiri setiap tahunnya telah mengalokasikan dana secara teratur untuk pelaksanaan program pemberian alat bantu sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Samarinda, sebagai salah satu bentuk implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kaltim No 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Program yang dilaksanakan sejak tahun 2021 ini telah menyalurkan berbagai jenis alat bantu difabel. Alat bantu yang diberikan mencakup alat bantu untuk penyandang disabilitas fisik dan disabilitas rungu, yaitu kursi roda, tongkat cakar, dan alat bantu dengar (*hearing aid*). Di tahun 2024, tersedia total 45 alat bantu untuk

penyandang disabilitas, yang terdiri dari 26 kursi roda, 12 alat bantu dengar (*hearing aid*), 6 tongkat kaki tiga, dan 1 tongkat walker sebagai alat bantu jalan.

Program Pemberian alat bantu difabel ini rutin diadakan sekali setiap tahunnya oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Samarinda dengan dua mekanisme, yaitu: turun langsung/*door to door* ke rumah penyandang disabilitas melalui relawan dibawah naungan Dinsospenmas, yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) melalui perantara kelurahan/kecamatan setempat yang memiliki warga penyandang disabilitas; dan dapat mengajukan langsung oleh perwakilan keluarga penyandang disabilitas ke kantor Dinsospenmas Kota Samarinda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana kebijakan pemberian alat bantu difabel oleh Dinsospenmas Kota Samarinda dapat terimplementasikan dengan baik, melalui analisa teori/model evaluasi.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana informan dipilih dengan 3 pengklasifikasian, diantaranya Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinsospenmas Kota Samarinda sebagai informan kunci; 2 pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsospenmas Kota Samarinda, 1 relawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan 1 relawan Pegawai Sosial Masyarakat (PSM) sebagai informan utama; serta 6 penyandang disabilitas/keluarga penyandang disabilitas yang menerima manfaat bantuan alat bantu difabel oleh Dinsospenmas Kota Samarinda. Sehingga total keseluruhan terdapat 11 informan penelitian.

Data-data yang diperoleh, peneliti bagi menjadi data primer dan data sekunder. Data-data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, baik saat di Kantor Dinsospenmas Kota Samarinda maupun di rumah penyandang disabilitas penerima alat bantu difabel. Data yang sudah diperoleh dan dirangkum, dianalisis memakai model Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018) agar tersusun secara sistematis dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Peneliti menyajikan kategori demi kategori tersebut berdasarkan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) oleh Daniel Stufflebeam, yang mana terdapat 4 komponen evaluasi yaitu evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, hingga evaluasi hasil. Masing-masing komponen penilaian tersebut kemudian akan dinilai untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan dari masing-masing komponen.

Metode penilaian menggunakan metode pengklasifikasian tiga kategori penilaian berupa Tinggi, Moderat, dan Rendah oleh Issac dan Michael, yang pada akhirnya didapatkan kesimpulan penilaian evaluasi program dalam bentuk persentase.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Data Penyandang Disabilitas Kota Samarinda

Data penyandang disabilitas yang dimiliki Dinsospenmas Kota Samarinda merupakan data keseluruhan penyandang disabilitas yang ada di Kota Samarinda yang dihimpun dari hasil survei Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ditingkat kelurahan. Keduanya merupakan kepanjangan tangan dan dibawah naungan langsung dari Dinsospenmas Kota Samarinda. Tidak ada data secara spesifik/pengkategorian yang dimiliki terkait jumlah penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas yang dimiliki, seperti jumlah penyandang disabilitas fisik, jumlah penyandang disabilitas mental, jumlah penyandang disabilitas intelektual, ataupun jumlah penyandang disabilitas sensorik.

Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas Kota Samarinda

Penyandang Disabilitas Kota Samarinda	Tahun		
	2022	2023	2024
	1711 jiwa	1828 jiwa	1587 jiwa

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2025

3.2 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pegawai Sosial Masyarakat (PSM) sebagai Pilar Gugus Tugas Layanan Sosial

Dalam menjalankan program-program kesejahteraan sosial, dikenal empat pilar sosial sebagai “penyambung tangan” atau mitra antara Dinsospenmas Kota Samarinda dengan warga masyarakat. Ke-empat pilar tersebut diantaranya Karang Taruna, Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Ke-empat pilar sosial inilah yang berperan aktif sebagai penggerak dan pengentas masalah kesejahteraan sosial dalam masyarakat (PMKS). Mereka dibentuk dan dijalankan dibawah naungan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI).

Terkait perencanaan hingga pelaksanaan program pemberian alat bantu difabel, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda bekerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di tingkat kecamatan dan Pegawai

Sosial Masyarakat (PSM) di tingkat kelurahan. Kedua pilar ini bertugas melakukan survei bersama RT dan RW setempat untuk mencari dan memastikan adanya penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan alat bantu difabel. TKS di tersebar di 10 Kecamatan yang ada di Kota Samarinda, sementara PSM tersebar di 59 Kelurahan di Kota Samarinda, yang mana terdapat 5-8 relawan PSM di masing-masing kelurahan. Berikut data jenis dan jumlah alat bantu difabel yang telah disalurkan dari tahun ke tahun.

Tabel 2. Data Jumlah Jenis Alat Bantu Difabel yang disalurkan oleh Dinsospenmas Kota Samarinda Tahun 2022-2024

No.	Jenis Alat Bantu	2022	2023	2024
1	Kursi roda	28	28	25
2	Tongkat kaki tiga	2	5	6
3	Tongkat walker	-	-	1
4	Tongkat ketiak	2	4	-
5	Alat bantu dengar (<i>hearing aid</i>)	-	8	12
Jumlah/Total		32	45	44

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2025

3.3 Analisis Evaluasi Program melalui Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Model evaluasi program CIPP merupakan salah satu model evaluasi yang banyak diaplikasikan oleh para evaluator dalam mengevaluasi suatu program. Model evaluasi CIPP pertama kali dikenalkan oleh Daniel Stufflebeam (1985:153) pada tahun 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*) (Suryadin, et. al, 2022). Model evaluasi ini memiliki empat komponen dasar penilaian, yaitu: evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap masukan, evaluasi terhadap proses, dan evaluasi terhadap hasil.

A. Evaluasi Konteks

Menurut Stufflebeam (dalam Suryadin, et. al, 2022), evaluasi konteks bertujuan untuk menilai status suatu objek secara menyeluruh. Konteks sendiri merujuk pada objek atau lingkungan tempat sebuah program diterapkan. Pertanyaan mendasar dalam evaluasi ini adalah "apa yang harus dilakukan?". Dalam evaluasi konteks, dilakukan penilaian terhadap: legalitas penyelenggaraan program; tujuan/latar belakang dari program pemberian alat bantu difabel oleh Dinsospenmas Kota Samarinda dalam kaitannya dengan kebutuhan dan masalah bagi penyandang

disabilitas di Kota Samarinda; proses pendataan jumlah penyandang disabilitas; dan proses pendataan calon penerima alat bantu difabel.

B. Evaluasi Masukan

Menurut Stufflebeam (dalam Suryadin, et al, 2022), fokus utama dalam evaluasi masukan adalah menentukan strategi untuk mencapai tujuan program. Evaluasi ini berperan dalam mengukur pengambilan keputusan, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, memilih alternatif yang tepat, serta merancang prosedur kerja yang efektif. Pertanyaan mendasar dalam evaluasi ini adalah “bagaimana mereka melaksanakannya?”. Beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi masukan meliputi: apakah relawan TKSK dan PSM terpilih memenuhi syarat kualifikasi sesuai dengan Permensos No. 28 Tahun 2018 tentang TKSK dan Permensos No. 10 Tahun 2019 tentang PSM; apakah relawan TKSK dan PSM memiliki deskripsi tugas yang jelas terkhusus pada pelaksanaan program pemberian alat bantu difabel; apakah relawan TKSK dan PSM mendapatkan bentuk pengembangan kapasitas oleh Dinsospenmas; apakah program pemberian alat bantu difabel mendapat dukungan atau kerjasama dari pihak luar; dan persepsi/pemahaman dari penerima alat bantu difabel terkait prosedur pengajuan alat bantu difabel dan pentingnya alat bantu difabel dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

C. Evaluasi Proses

Menurut Stufflebeam (dalam Suryadin, et al, 2022), inti dari evaluasi proses adalah menilai bagaimana suatu program yang telah direncanakan dilaksanakan. Pertanyaan mendasar dalam evaluasi ini adalah, “apakah dikerjakan sesuai rencana?”. Beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi proses meliputi: apakah mekanisme penyaluran alat bantu difabel dilakukan dengan baik dan terstruktur; apakah mekanisme pencatatan data penyandang yang telah menerima alat bantu sudah cukup jelas; seperti apa mekanisme standar pengukuran alat bantu difabel; dan seperti apa mekanisme monitoring program.

D. Evaluasi Hasil

Menurut Stufflebeam (dalam Suryadin, et al, 2022), Evaluasi hasil berusaha untuk menilai, menganalisis, menentukan pencapaian suatu program serta mengukur kesesuaian/sejauh mana program tersebut telah memenuhi kebutuhan kelompok sasaran yang dilayani. Pertanyaan mendasar dari evaluasi ini adalah “apakah berhasil?”. Adapun kesesuaian yang dinilai dalam hal ini mencakup beberapa aspek, yaitu: kesesuaian antara data calon penerima manfaat alat bantu difabel dengan hasil pelaksanaan di lapangan; kesesuaian alat bantu yang diberikan dengan kondisi atau

kebutuhan penerima; serta pencapaian tujuan yang diharapkan oleh Dinsospenmas Kota Samarinda dalam program pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas.

3.4 Analisis Ketercapaian Evaluasi Program

Analisis ketercapaian evaluasi program juga dibutuhkan dalam proses mengevaluasi suatu program agar dapat menggambarkan sebuah penilaian yang lebih jelas terhadap evaluasi tersebut. Analisis ketercapaian evaluasi program merupakan proses mencari dan menyusun banyaknya data dari hasil wawancara yang diselaraskan dengan Model Evaluasi Program CIPP oleh Daniel Stufflebeam. Hasil dari analisis tersebut nantinya berupa persentase ketercapaian di ke-empat komponen Model Evaluasi Program CIPP, yang pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan Isaac & Michael dalam Hadiwinarto (2020) mengungkapkan bahwa, keputusan-keputusan yang diambil dijadikan sebagai indikator-indikator penilaian kinerja (*assesement performance*) yang pada setiap tahapan evaluasinya dibagi ke dalam tiga kategori diantaranya rendah, moderat, dan tinggi.

Tabel 3. Klasifikasi Aktualisasi Objek Ketercapaian Evaluasi Program

Aktualisasi Objek	Keterangan	Kode	Nilai
Rendah	Kriteria keberhasilan tidak terpenuhi sama sekali	RN	0% - 33,33%
Moderat	Kriteria keberhasilan terpenuhi Sebagian	MO	33,34% - 66,57%
Tinggi	Kriteria keberhasilan terpenuhi semua	TG	66,68% - 100%

Sumber: Hadiwinarto, 2020

Adapun perhitungan yang dilakukan penulis untuk menganalisis ketercapaian program pemberian alat bantu difabel dihitung berdasarkan:

$$\frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Nilai sempurna}} \times 100\%$$

Keterangan:

RN : Rendah (skor 1)

MO : Moderat (skor 2)

TG : Tinggi (skor 3)

Nilai Perolehan : Diperoleh berdasarkan jumlah nilai pencapaian aktualisasi setiap 1 komponen evaluasi

Nilai Sempurna : Diperoleh berdasarkan jumlah keseluruhan komponen evaluasi dengan skor tinggi

3.5 Hasil Analisis Ketercapaian Evaluasi Program

3.5.1 Evaluasi Konteks

Pada Evaluasi Konteks, hasil ketercapaian evaluasi program berada pada tingkat tinggi, sebesar 75%. Pada evaluasi ini, sebagian besar aspek penilaian sudah cukup terpenuhi. Program pemberian alat bantu difabel memiliki legalitas hukum yang mengatur serta memiliki latar belakang dan tujuan yang jelas. Namun yang menjadi catatan adalah, Dinsospenmas Kota Samarinda masih belum optimal dalam mendata penyandang disabilitas. Tidak ada data secara spesifik/pengkategorian yang dimiliki oleh Dinsospenmas Kota Samarinda terkait jumlah penyandang disabilitas di Kota Samarinda dengan jenis disabilitas yang dialami. Dalam penyalurannya pula, relawan TKSK dan PSM hanya terfokus pada alat bantu yang tersedia, yaitu kursi roda, tongkat kaki tiga, tongkat walker, tongkat ketiak, dan alat bantu dengar (*hearing aid*).

3.5.2. Evaluasi Masukan

Pada Evaluasi Masukan, hasil ketercapaian evaluasi program berada pada tingkat moderat, sebesar 66%. Pada evaluasi ini, beberapa aspek telah terpenuhi sebagian. Sebagian dari relawan TKSK dan PSM telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai calon relawan TKSK dan PSM, namun terdapat catatan bahwasanya masih ada dari relawan TKSK yang belum dapat menggunakan komputer dengan baik, yang mana hal ini merupakan salah satu persyaratan kualifikasi yang juga tertera dalam Permensos RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang TKSK. Relawan TKSK ditempatkan sebanyak 1 relawan di setiap 10 kecamatan, sementara relawan PSM tersebar di 59 kelurahan dengan 5–8 relawan per kelurahan.

Deskripsi tugas yang diberikan oleh Dinsospenmas kepada relawan TKSK dan PSM terkhusus pada program pemberian alat bantu juga telah cukup jelas. Tak hanya itu, kedua relawan juga telah mendapatkan bentuk pengembangan kapasitas oleh Dinsospenmas setiap tahunnya, seperti pelatihan dasar dan bimbingan teknis. Namun yang menjadi catatan, ditemukan informasi bahwasanya Dinsospenmas Kota Samarinda bersama relawan TKSK dan PSM belum pernah menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan lembaga maupun pihak eksternal dalam pelaksanaan program ini, yang hingga sekarang masih sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Dinsospenmas Kota Samarinda.

Dari persepsi dan pemahaman penerima manfaat alat bantu difabel, didapatkan informasi bahwa sebagian besar dari mereka telah memahami dengan jelas prosedur pengajuan serta pentingnya alat bantu tersebut dalam mendukung aktivitas sehari-

hari. Namun, peneliti menemukan bahwasanya beberapa alat bantu tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penerima, sehingga penggunaannya kurang optimal dan kurang menunjang aktivitas sehari-hari mereka.

3.5.3. Evaluasi Proses

Pada evaluasi proses, capaian program berada pada tingkat moderat, yaitu 58%. Beberapa aspek program sudah terlaksana sebagian. Penyaluran alat bantu difabel serta pendataan penerima manfaat alat bantu difabel telah dilakukan dengan cukup baik, dimana proses penyaluran dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, laporan dari relawan TKSK di tingkat kecamatan dan PSM di tingkat kelurahan yang mengidentifikasi adanya penyandang disabilitas di wilayah mereka. Kedua, penyandang disabilitas atau keluarganya dapat melapor langsung ke Kantor Dinsospenmas Kota Samarinda. Kedua mekanisme ini disertai bukti berupa surat keterangan dari Ketua RT atau Lurah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumentasi calon penerima manfaat. Setelah menerima laporan, Dinsospenmas mencatat data calon penerima dan alat bantu yang diajukan berupa nama, tempat tanggal lahir, NIK, jenis disabilitas, jenis bantuan yang diberikan, nama relawan TKSK/PSM pengusul, serta dokumentasi. Hanya saja, ditemukan bahwa masih ada beberapa data penerima yang tidak disertai dokumentasi.

Yang kemudian menjadi catatan adalah, Dinsospenmas Kota Samarinda tidak melakukan pengukuran alat bantu difabel yang menyesuaikan kondisi disabilitas penerima. Alat bantu difabel yang tersedia dan yang diberikan berukuran sama rata. Kendala utama dalam hal ini adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Namun demikian, tetap terjadi peningkatan terhadap jenis alat bantu yang disediakan dari tahun ke tahun. Tak hanya itu, proses monitoring yang dilakukan oleh Dinsospenmas Kota Samarinda hanya dilakukan satu kali setelah kurang lebih dua bulan disalurkan alat bantu difabel kepada penerima. Tidak ada monitoring yang dilakukan secara berkala dalam program ini.

3.5.4. Evaluasi Hasil

Pada Evaluasi Hasil, hasil ketercapaian evaluasi program berada pada tingkat moderat, sebesar 66%. Pada evaluasi ini, beberapa aspek telah terpenuhi sebagian. Dinsospenmas Kota Samarinda telah menjalankan program pemberian alat bantu difabel dengan baik, namun belum cukup optimal. Ketidaksesuaian baik dari segi ukuran, kenyamanan, maupun tingkat keparahan disabilitas penerima menunjukkan bahwa tujuan program dalam mendukung kemandirian dan mobilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Samarinda belum sepenuhnya tercapai.

4. KESIMPULAN

Pada aspek konteks, sebagian besar komponen evaluasi telah terpenuhi dengan beberapa catatan bahwa masih kurang optimalnya pendataan dalam mengkategorikan jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenisnya. Pada aspek masukan, komponen evaluasi terpenuhi sebagian. Tidak adanya bentuk kerja sama dengan pihak luar sementara hal tersebut merupakan suatu aspek yang cukup besar untuk menunjang kesuksesan suatu program.

Begitu pula pada aspek proses dan hasil, komponen evaluasi keduanya terpenuhi sebagian. Proses monitoring yang hanya dilakukan satu kali, alat bantu yang tersedia dan yang diberikan berukuran sama rata, hingga muncullah berbagai ketidaksesuaian mulai dari segi ukuran, kenyamanan, maupun tingkat keparahan disabilitas penerima alat bantu difabel. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh Dinsospenmas Kota Samarinda yaitu mendukung kemandirian dan mobilitas penyandang disabilitas belum sepenuhnya tercapai.

Maka dengan hasil analisa evaluasi ini, Dinsospenmas Kota Samarinda kiranya dapat mendata jumlah penyandang disabilitas setiap tahun berdasarkan jenisnya, agar data yang dihimpun lebih terstruktur dan memudahkan pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh pegawai, termasuk relawan TKSK dan PSM. Selain itu, diharapkan alokasi anggaran dana program ini dapat ditingkatkan tiap tahunnya.

Dinsospenmas Kota Samarinda kiranya juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak luar, baik dengan perusahaan maupun LSM. Utamanya pada lembaga yang juga berkecimpung dalam upaya memberdayakan penyandang disabilitas. Kedepannya, Dinsospenmas Kota Samarinda kiranya menyediakan alat bantu difabel berdasarkan standar pengukuran yang telah dilakukan yang mempertimbangkan proporsi tubuh, kenyamanan, dan tingkat keparahan, bukan lagi bersifat merata.

Monitoring rutin juga penting untuk memastikan alat bantu benar-benar bermanfaat dan mendukung aktivitas penerima setiap tahunnya. Relawan TKSK dan PSM dalam meng-survei kiranya dapat lebih memperhatikan kesesuaian, kenyamanan, dan tingkat keparahan disabilitas calon penerima sebelum penyaluran, demi mengoptimalkan daya guna alat bantu. Kiranya juga dapat membuka ruang bagi penerima alat bantu untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran terkait alat bantu yang telah mereka terima.

REFERENSI

- Adnyani, N. N. P., & Surata, I. N. (2019). "Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng". *Kertha Widya*, 7(2), 42-55. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/517>.
- Amelia, M., Handoko, R., & Widodo, J. (2022). "Implementasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kabupaten". In *Seminar Nasional Hasil Skripsi* (Vol. 1, No. 01, pp. 201-205). <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhs/article/view/1058/520>.
- Andari, S. (2020). "Penggunaan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) WIRAJAYA". *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(3). <https://www.academia.edu/download/77186310/pdf.pdf>.
- Aprillia, A., Sugiarti, C., & Aryani, L. (2021). "Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 202-212. <http://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/1897>.
- Chisnullah, M. R., & Meirinawati, M. (2022). "Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri kabupaten Jombang) oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Studi Pada Desa Bongkot)". *Publika*, 937-952. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47450>.
- Ilahi, G. W., Setiawati, B., & Jamaludin, J. (2018). "Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dilihat dari Aspek Responsivitas Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Bersosialisasi Pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin". *JAPB*, 1(1), 120-136. <https://www.jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/107>.
- Indraningrum, S., & Puspitasari, C. D. (2021). "Upaya pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Magelang". *AGORA*, 10(2), 214-224. <https://journal.student.uny.ac.id/civics/article/view/17317/16717>.
- Jefri & Mubarak. (2022). "Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. 6(4). <file:///C:/Users/USER/Documents/Jurnalku/3876-14028-1-PB.pdf>.
- Krisnada, K., & Widodo, S. (2019). "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Kediri". *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(1). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/1357>.

- Ndaumanu, F. (2020). "Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah". *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150. <https://core.ac.uk/download/pdf/322562053.pdf>.
- Rama, A., Ambiyar, A., Rizal, F., Jalinus, N., Waskito, W., & Wulansari, R. E. (2023). "Konsep Model Evaluasi Context, Input, Process dan Product (CIPP) di Sekolah Menengah Kejuruan". *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 82-86. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/view/2976>.
- Ramadhana, R. (2022). "Peran Dinas Sosial Aceh Besar Dalam Pemenuhan Hak Sosial Penyandang Disabilitas". (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24629/>.
- Sagama, S., & Ahyar, M. (2020). "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Terhadap Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas". *Fenomena*, 12(2), 197-214. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/2813>.
- Sukmana, O. (2020). "Program Peningkatan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas Netra". *Dalam Jurnal Sosio Konsepsia*, 9(02). <https://core.ac.uk/download/pdf/492911824.pdf>.
- Sulastri, L., Aprilyan, D. F., Nuriana, M. F., Jumiati, R. S., Nuraeni, S., & Nurâ, S. (2022). "Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penyaluran Bantuan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas". *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 7(1), 7-15. <https://ejournal.lppmunsap.org/index.php/jrpa/article/view/100>.
- Susanto, H. (2017). "Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan". <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32279>.
- Syobah, S. N. (2018). "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur". *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251-272. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/nuansa/article/view/2057>.
- Terru, I., Kurniawan, B. A., & Ismail, I. (2023). "Upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Dalam Menunjang Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas". *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 425-430. <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/1639>.
- Vawitrie, Y. (2018). "Implementasi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru". https://digilib.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=75262.
- Yudhoyono, S., & ALW, L. T. (2021). "Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Grobogan". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 190-202. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11088>.

- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. "Bidang Rehabilitasi Sosial". <https://dinsos.samarindakota.go.id/bidang/bidang-pengendalian-penduduk>.
- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. "Tugas Pokok dan Fungsi". <https://dinsos.samarindakota.go.id/laman/tugas-pokok-fungsi>.
- Gamal, T. (2022). "Model – Model Evaluasi: CIPP, Stake, Alkin, Kirkpatrick, Brinkerhoff". <https://serupa.id/model-model-evaluasi-cipp-stake-alkin-kirkpatrick-brinkerhoff/>.
- Flex-free. (2016). "Penggunaan Orthosis pada Masalah Otot Tulang Sendi". <https://flexfreeclinic.com/artikel/detail/125?title=penggunaan-orthosis-pada-masalah-otot-tulang-sendi>.
- Koran Kaltim. "Dinas Sosial dan PenMas Kota Samarinda Bantu Penyandang Disabilitas". <https://korankaltim.com/read/samarinda/54197/dinsos-pm-samarinda-bantu-penyandang-disabilitas>.
- Kustiani, R. (2020). "10 Fakta Unik Tingkat Putih Tunanetra". Tempo.co. <https://difabel.tempo.co/read/1329709/10-fakta-unik-tingkat-putih-tunanetra>.
- Niaga Asia. (2023). "Tiap 100 Penduduk Kaltim Umur 5 Tahun ke Atas 1,31% Alami Disabilitas". <https://www.niaga.asia/tiap-100-penduduk-kaltim-umur-5-tahun-ke-atas-131-alami-disabilitas/>.
- Nurin, F. (2021). "Bagaimana Cara Kerja Alat Bantu Dengar?". Hello Sehat. <https://hellosehat.com/tht/telinga/alat-bantu-dengar-dan-implan-koklea/>.
- Pratiwi, R. (2023). "Seputar Proteza Mata (Mata Palsu) yang Perlu Anda Ketahui". Hello Sehat. <https://hellosehat.com/mata/perawatan-mata/protesa-mata/>.
- Hadiwinarto. (2020). "Evaluasi Bimbingan dan Konseling". Yogyakarta: UNY Press. https://books.google.co.id/books/about/Evaluasi_Bimbingan_dan_Konseling.html?id=rhcREAAAQBAJ&redir_esc=y.
- Hasan, Muhammad, et al.(2003). "Metode Penelitian Kualitatif". Penerbit Tahta Media. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/182>.
- Lexy, J. Moelong. (2010). "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). "Metodologi Penelitian Kualitatif". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Suryadin, et.al. (2022). "Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, and Product) antara Teori dan Praktiknya". Bantul: Samudra Biru. https://books.google.co.id/books/about/EVALUASI_PROGRAM_MODEL_CIPP_Context_Inpu.html?id=OxamEAAAQBAJ&redir_esc=y.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Soisal Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan (TKSK).

Peraturan Menteri Soisal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.